



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUWANDI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 217999

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 655.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/80 m² di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/35 m² di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 145 m² di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 832 m² di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 320 m² di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 264.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA GLP III SPORT 160 CC Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



6. MOTOR, HONDA CB Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	58.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	249.175.750
F. HARTA LAINNYA	Rp.	200.000.000
Sub Total	Rp.	1.426.175.750
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.426.175.750

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.